

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori pada penelitian ini memuat studi pustaka terkait variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembahasan dituliskan dengan pola umum ke khusus, dimana peneliti terlebih dahulu menerangkan sekilas terkait keuangan daerah dan sumber sumber keuangan daerah melalui diagram alir yang kemudian dilanjutkan dengan memaparkan salah satu sumber keuangan daerah yang diangkat sebagai variabel dependen dalam penelitian ini yaitu PAD.

1. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Status sebagai daerah otonom menjadikan setiap daerah di Indonesia mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Guna menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, sejatinya pemerintahan suatu negara mengemban tiga fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat;

- 2) Fungsi distribusi yang meliputi pendistribusian pendapatan dan kekayaan masyarakat, serta pemerataan pembangunan;
- 3) Fungsi stabilitas yang meliputi penentuan strategi pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter.

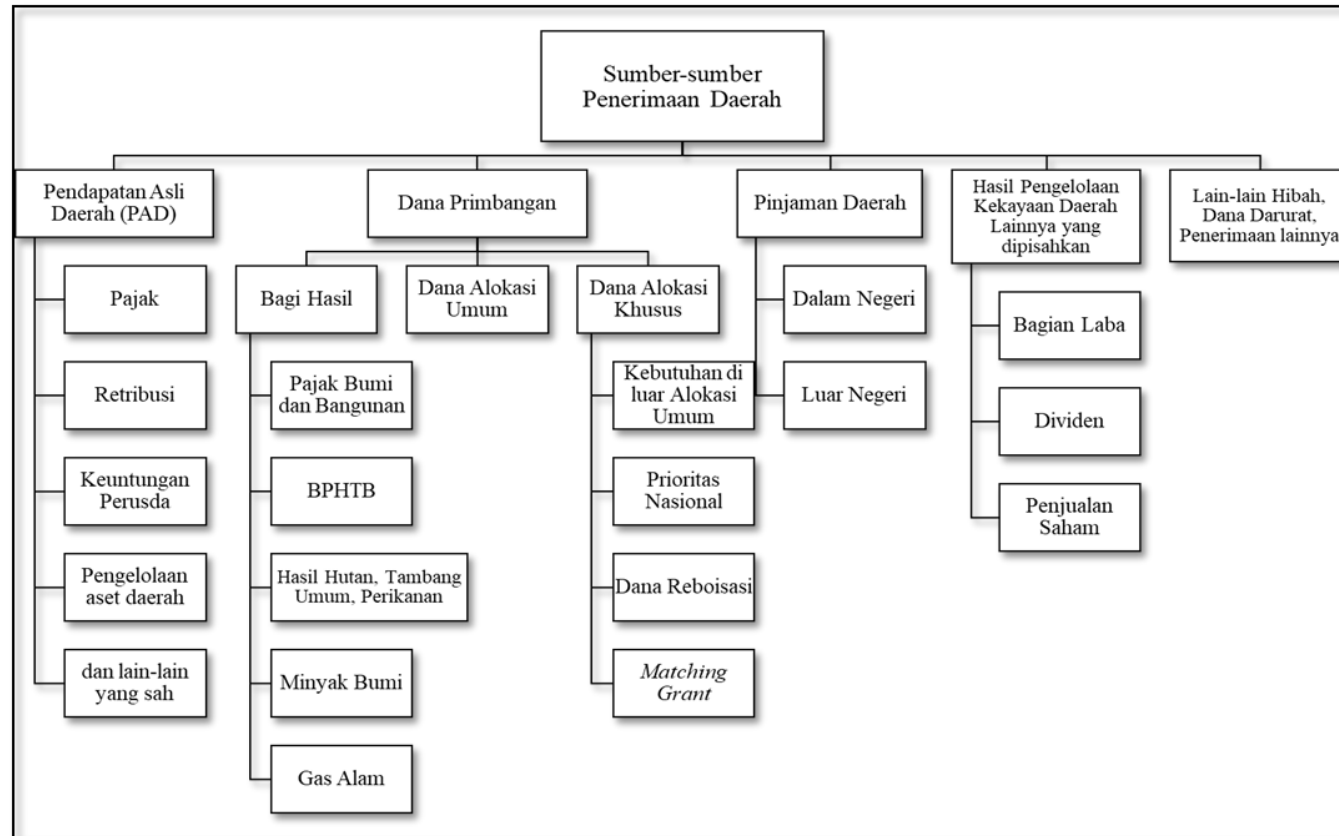
Pelaksanaan fungsi distribusi dan stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, kemudian fungsi alokasi umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena daerah pada umumnya mengetahui secara spesifik terkait kebutuhannya serta standar pelayanan untuk masyarakatnya. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas.

a. Dasar-Dasar Pembiayaan Pemerintah Daerah

Sumber pembiayaan Pemerintahan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kemudian penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban APBN. (Bratakusumah & Solihin, 2002)

b. Sumber-Sumber Pembiayaan Pemerintah Daerah



Sumber: Bratakusumah & Solihin, 2002

GAMBAR 2. 1.
Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Beberapa sumber-sumber pembiayaan yang dibebankan pada APBD tersebut antara lain:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri bersumber dari pungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah, hasil BUMD dan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah seperti hasil penjualan aset daerah dan jasa giro.
- 2) Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat setempat (Wijaya, 2002). Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- 3) Pinjaman Daerah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan di kelola dalam APBD. Pinjaman daerah sendiri bersumber dari pinjaman yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri.
- 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pembagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah; serta
- 5) dan lain-lain yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari dana hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai perundangundangan yang berlaku.

2. Pendapatan Asli Daerah.

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu dari sumber-sumber penerimaan daerah. Terdapat beberapa definisi dari Pendapatan Asli Daerah menurut beberapa sumber, *“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. (Bratakusumah dalam Supriady, 2004). Adapun definisi PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa, *“Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa, *“Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”*.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, pasal 6, angka 1 menyatakan, *“PAD bersumber dari: pajak daerah,*

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.”

1) Pajak Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 bab I, pasal 1, angka 10 menyatakan:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Bratakusumah (2004) sesuai dengan UU RI No.

28 Tahun 2009, pajak daerah berdasarkan wilayahnya terbagi menjadi dua yakni pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Adapun jenis pada pajak provinsi ditetapkan menjadi empat jenis pajak, yakni :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, yaitu pajak yang dikenakan karena status kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, yaitu pajak karena adanya transaksi atau pemindahtanganan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air; dan
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi kepentingan pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Menurut Bratakusumah (2004), pajak Kabupaten/Kota yang terbagi menjadi tujuh jenis pajak, yakni :

- a) Pajak Hotel, yaitu pajak atas jasa layanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi pengunjung dari luar daerah atau sedang dalam perjalanan untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran.
- b) Pajak Restoran, yaitu pajak atas jasa pelayanan restoran. Restoran adalah tempat yang menyediakan berbagai makanan dan/atau minuman yang kemudian dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.

- c) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- d) Pajak Reklame, yaitu pajak atas pengadaan reklame atau iklan. Reklame merupakan media yang berdasarkan bentuk dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk mempromosikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh orang umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- e) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerang jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pajak Parkir, pajak yang dikenakan atas pengadaan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

2) Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 bab I, pasal 1, angka 64 menyatakan:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- a) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
- b) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- c) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada individu secara pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan

ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya terdapat beberapa istilah yang dikenal berkaitan dengan retribusi, yang dijelaskan juga dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 seperti :

- a) Wajib Retribusi, yakni orang yang wajib membayar pungutan kepada pemerintah daerah karena telah menggunakan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- b) Objek Retribusi, yakni berbagai jenis jasa atau fasilitas yang disediakan Pemerintah daerah untuk khalayak.
- c) Subjek retribusi, yakni setiap individu atau badan yang memperoleh izin menggunakan jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- d) Tarif retribusi adalah nilai uang atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah/unit tingkat penggunaan jasa.
- e) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- f) Surat Setoran retribusi daerah yang disebut juga SSRD adalah surat yang dibawa oleh wajib retribusi saat melakukan pembayaran

atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2004 Pasal 6 ayat 2 menjelaskan:

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d meliputi : hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD.

Definisi penduduk berdasarkan UUD 1945 pasal 26 ayat 2,

“Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Kemudian dijelaskan pula secara umum

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia bahwa, “*penduduk indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili di Indonesia kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap*”. Begitu pula dalam lingkup regional, dikatakan penduduk suatu daerah apabila seseorang telah berdomisili selama 6 bulan lebih dan memiliki bukti izin tinggal dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan seseorang warga negara asing yang berdomisili di suatu daerah kurang dari 6 bulan dikarenakan terdapat kepentingan seperti adanya kontrak kerja, penelitian, liburan yang keseluruhannya telah memenuhi syarat perizinan untuk tinggal sementara.

Menurut Todaro (1994), pertumbuhan penduduk (walaupun di nilai dapat menghambat), namun secara tradisional, pertumbuhan penduduk di nilai menjadi faktor yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya jumlah pertumbuhan penduduk akan berdampak pada penambahan tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja akan menambah jumlah tenaga yang produktif, selain itu meningkatnya jumlah penduduk juga dapat memperluas pasar domestik. Pernyataan tersebut juga didukung dengan pendapat Hudyanto (2015) yang menyatakan bahwa pada dasarnya pertumbuhan ekonomi salah satunya bersumber dari jumlah penduduk atau sumberdaya insani (*population, human resources*) atau jumlah angkatan kerja, atau dalam bahasa mikro disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja di nilai sebagai sumber produksi karena tanpa tenaga

kerja (sejumlah penduduk) maka sumber daya alam dan modal tidak bisa memproduksi sendiri.

Pada teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh David Ricardo tersirat sebuah kesimpulan, dimana Ricardo menyimpulkan bahwa, *“perpacuan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dimenangkan oleh pertumbuhan penduduk, dan dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai keadaan yang stasioner”*. (Hudiyanto, 2015)

Pada mahzab klasik ini, Ricardo memfokuskan persoalan pada peranan penduduk dalam mencapai output yang optimal guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Hudiyanto (2015) yang menyatakan :

Apabila jumlah penduduk meningkat pesat, maka output akan meningkat pula. Sebaliknya apabila jumlah penduduk menurun, maka tingkat output juga akan menurun. Demikian juga bila jumlah penduduk konstan, tingkat output juga akan konstan. Oleh karena tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh jumlah penduduk, maka perhatian tertentu dipusatkan pada jumlah penduduk.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dirumuskan $Q = f(P)$. Namun kemudian, Ricardo menjelaskan bahwa dalam jangka panjang jumlah penduduk akan berada pada kondisi stasioner, sehingga kondisi perekonomian diperkirakan akan konstan.

Jika dihubungkan dengan PAD, pernyataan terkait peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan output, meningkatnya output dapat meningkatkan *income*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif terhadap PAD. Karena adanya

peningkatan output dari penduduk atau masyarakat, mengindikasikan adanya potensi peningkatan PAD yang terhimpun.

2. Pengaruh PDRB terhadap PAD.

PDRB diartikan sebagai sejumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi/perusahaan yang bertempat di suatu daerah yang dihitung setelah kurun waktu satu tahun. Dalam perhitungan PDRB ini juga termasuk barang atau produk dari perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut (Misalnya: Dunkin Donuts, MC Donald, Carrefour, dan lain sebagainya).

Definisi lain menyatakan bahwa PDRB adalah hasil bersih dari semua kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua produsen dalam suatu negara dari berbagai sektor ekonomi disebut Produk Domestik Bruto (Suparmoko, 1991). Hal yang perlu di garisbawahi adalah kata "*hasil bersih dari semua kegiatan produksi*", hasil bersih yang kemudian dikenal sebagai agregat di sini tidak sama dengan jumlah keseluruhan dari produksi barang dan jasa yang ada. Karena dalam perhitungan jumlah keseluruhan barang dan jasa terdapat kemungkinan terjadinya penghitungan ganda atau lebih, yaitu terhadap barang-barang yang digunakan dalam proses produksi sebagai bahan baku dan penolong untuk memproduksi barang-barang di sektor lainnya. Oleh sebab itu definisi dari Produk Domestik Bruto kemudian diperjelas menjadi jumlah nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi, dan diperoleh sebagai selisih antara nilai

Produksi Bruto yang dinilai atas dasar harga yang diterima oleh produsen, dikurangi pemakaian bahan baku dan penolong yang di nilai atas dasar harga pembeli.

Sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia diklasifikasikan menjadi 17 lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estat*; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan jasa lainnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2018).

PDRB berdasarkan perhitungannya dibagi menjadi dua. *Pertama*, PDRB atas dasar harga berlaku (*current price*) merupakan PDRB yang dihitung berdasarkan harga barang dan jasa pada saat itu juga. *Kedua*, PDRB atas dasar harga konstan (*constant price*) atau disebut juga PDRB riil adalah PDRB yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sesuai dengan yang ditetapkan otoritas, sehingga PDRB ini tidak memperhatikan perubahan harga setiap waktunya (mengabaikan inflasi).

Jika dikaitkan pengaruh antara PDRB dan PAD, maka hal yang dapat dijelaskan adalah besarnya PDRB yang di dapat suatu daerah menggambarkan banyaknya produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor

ekonomi. Semakin banyak barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan akan berdampak pada besaran persentase penarikan atas pajak dan retribusinya. Hal ini akan sebanding dengan besaran PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan PAD.

Pengeluaran pemerintah adalah semua kegiatan pemerintahan yang memerlukan uang dalam pelaksanaannya. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Ketika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa guna membangun perekonomian, maka pengeluaran pemerintah adalah cerminan dari biaya yang harus digelontorkan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan yang ditetapkan tersebut (Mangkoesoebroto, 1999).

Pengeluaran pemerintah yang kemudian diterjemahkan menjadi belanja pemerintah pada APBN berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, pasal 36 dibagi menjadi dua kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan, artinya dilaksanakan atau tidaknya suatu program, dana untuk program tersebut tetap dianggarkan. Berbeda halnya dengan belanja langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau

kegiatan, artinya dana/biaya yang dianggarkan karena adanya program atau kegiatan yang pasti dilaksanakan.

Pada pasal 37 Permendagri No.13 Tahun 2006 diperjelas kelompok-kelompok yang termasuk ke dalam belanja tidak langsung yakni terdiri dari:

- a. Belanja pegawai, belanja kompensasi berupa gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai kompensasi yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil.
- b. Belanja bunga, anggaran yang dipersiapkan untuk membayar bunga utang pemerintah yang dihitung atas kewajiban hutang pokok (*pricipal outstanding*) baik berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
- c. Belanja subsidi, pengeluaran yang digunakan untuk membantu biaya produksi bagi perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual barang yang ditawarkan produsen dapat dijangkau oleh masyarakat.
- d. Belanja hibah, pengeluaran yang dianggarkan untuk pemberian hibah, baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah yang lainnya, dan juga kepada kelompok masyarakat/perorangan yang secara persyaratan klasifikasi telah sesuai dan ditetapkan peruntukannya.

- e. Bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah yang dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, baik dalam bentuk uang/atau barang dengan tujuan meningkatkan kesatuan masyarakat.
- f. Belanja bagi hasil merupakan pengeluaran yang berasal dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, ataupun pendapatan pemerintah suatu daerah kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Bantuan keuangan adalah pengeluaran pemerintah yang dianggarkan untuk bantuan keuangan baik bersifat umum maupun khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya. Bantuan keuangan juga bisa berasal dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan/atau peningkatan kemampuan keuangan suatu daerah.
- h. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran yang dianggarkan pemerintah sebagai cadangan dana untuk kegiatan yang bersifat dadakan atau untuk pembiayaan terhadap hal-hal yang tidak diharapkan berulang seperti pengeluaran untuk menanggulangi bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Pada Permendagri nomor 13 Tahun 2006 paragraf 2 dijelaskan lebih lanjut jenis belanja yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung. Terdapat tiga jenis belanja yang termasuk ke dalam belanja langsung, yakni:

- a. Belanja pegawai, belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran honorarium/upah ketika seorang pegawai melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- b. Belanja barang dan jasa, pengeluaran yang dianggarkan untuk pengadaan/pembelian barang yang memiliki nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal, pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan memberikan nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

Teori Peacock dan Wiseman berusaha menjelaskan bahwa pemerintah selalu ingin memperbesar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan ekonomi, sementara masyarakat semakin tidak ingin membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang akan diperbesar tersebut. Pandangan tersebut menjadi dasar dari teori pemungutan suara. Berdasarkan pandangan tersebut artinya

pada tingkat tertentu dari besaran pajak, masyarakat dapat memahami kegunaan dari pungutan pajak yang dibayarkan adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Toleransi atas besaran pungutan pajak tersebut merupakan wujud dari kesadaran masyarakat bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga masyarakat merasa bersedia untuk membayar pajak.

Adanya tingkat toleransi pajak ini menjadi kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak semena-mena. Pemerintah harus menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah benar-benar menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi baik, sehingga masyarakat dapat menaikkan tingkat toleransi pajak dan penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dapat seimbang. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut:

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pengeluaran pemerintah yang semakin besar apabila digunakan dengan pembagian porsi secara tepat, maka meminimalisir stigma negatif atas besaran pungutan pajak. Dampak dari pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dapat dirasakan masyarakat melalui meningkatnya fasilitas publik dan meningkatnya pendapatan. Meningkatnya pendapatan dan fasilitas yang didapatkan masyarakat, dapat menaikkan tingkat toleransi

atas pajak, pungutan retribusi dan lain sebagainya, sehingga penerimaan pemerintah akan meningkat (PAD meningkat).

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah cukup banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan variabel-variabel yang bervariasi dengan lokasi penelitian yang berbeda-beda juga. Beberapa variabel yang umum digunakan dalam penelitian terkait determinasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya : jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, investasi dan lain sebagainya.

Walaupun dasar teori yang digunakan relatif sama, namun sebagian besar kesimpulan tidak menunjukkan hasil yang sama, terdapat beberapa perbedaan yang dikarenakan faktor lokasi penelitian yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa penelitian terlebih dahulu :

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu terkait Determinan PAD

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Model	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
1	Purbayu Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu	2005	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faoktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Penduduk • PDRB • Pengeluaran Pembangunan 	<p><u>Simultan:</u> Penduduk, PDRB, dan pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Kediri.</p> <p><u>Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD • PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD • Pengeluaran pembangunan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.
2	Supriyono	2009	Peran Dana Perimbangan, PDRB, dan Jumlah Penduduk terhadap PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah di Wilayah Solo Raya	Regresi Linier dengan data panel	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Dana Perimbangan • PDRB • Jumlah Penduduk • Otonomi Daerah 	<p><u>Simultan:</u> PDRB, jumlah penduduk, dummy otonomi daerah, interaksi antara dummy otonomi daerah dengan PDRB, dummy otonomi daerah dengan jumlah penduduk secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap PAD, dibuktikan dengan nilai R^2-Adjusted sebesar 0,9449.</p>

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Model	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
						<u>Parsial:</u> <ul style="list-style-type: none"> • PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD • Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD • Dummy otonomi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. • Dummy otonomi daerah dengan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD <p>Dummy otonomi daerah dengan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD</p>
3	Putu Lia Perdana Sari	2013	Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi PAD Provinsi Bali	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Kunjungan Wisatawan • Investasi • PDRB 	<u>Simultan:</u> <p>Kunjungan wisatawan, investasi, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini dapat dilihat dari R^2 senilai 0,96 dan signifikansi F-hitung yang bernilai $< \alpha=0,05$</p>

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Model	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
						<u>Parsial:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. • Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD
4	Gde Bhaskara Perwira Jaya dan A. A Bagus Putu Widanta	2014	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap PAD Kota Denpasar	Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Jumlah Penduduk • Jumlah Wisatawan 	<u>Simultan:</u> PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap PAD. <u>Parsial:</u> <ul style="list-style-type: none"> • PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD • Jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD • Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD
5	Pande Paramitha Wulandari dan Anak Agung	2014	Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan per Kapita • Tingkat inflasi • Investasi • Otonomi daerah 	<u>Simultan:</u> Pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi, dan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Bali.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Model	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
	Ketut Ayuningsasi					<u>Parsial:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD • Tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD • Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Otonomi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD.
6	Yeny Kuriawati Gitaningtyas dan Taufik Kurrohman	2014	Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta terhadap realisasi PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Jumlah Penduduk • Investasi Swasta 	<u>Simultan:</u> PDRB, jumlah penduduk, dan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap PAD. <u>Parsial:</u> <ul style="list-style-type: none"> • PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD • Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Model	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
7	Theodora Ririn, Rida Prihatni, dan Yunika Murdayanti	2014	Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Investasi • PDRB 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD <p><u>Simultan:</u> Belanja modal, investasi, dan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.</p> <p><u>Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. • Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. • PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
8	Hewi Susanti, Mohd. Nur Syechalad, dan Abubakar Hamzah	2017	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh terhadap PAD Provinsi Aceh Setelah Tsunami	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Pengeluaran Pemerintah 	<p><u>Simultan:</u> Pertumbuhan ekonomi dan Pengeluaran pemerintah secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap PAD.</p> <p><u>Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Aceh.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Model	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
						<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Aceh
9	Agus Indristno Kurniawan, Theresia Militina, dan Rachmad Budi Suharto	2017	Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah serta Tenaga Kerja terhadap PAD dan Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda dengan SPSS 24	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi swasta • Pengeluaran pemerintah • Tenaga kerja 	<p><u>Simultan:</u> Investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.</p> <p><u>Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Investasi swasta berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. • Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. • Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
10	Muhammad Surya Anggara	2017	Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Peningkatan Penerimaan PAD Kota Pekanbaru	Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Jumlah Penduduk • Inflasi 	<p><u>Simultan:</u> Jika PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi bersifat konstan maka akan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD</p>

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Model	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
						<p><u>Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. • Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD.
11	Danang Triyanto, Setyo Tri Wahyudi, Chandra Fajri Ananda	2017	<i>The Effect of Capital Expenditure on Local Own-Source Revenue: Study in East Java Indonesia</i>	<i>Path analysis</i> (Analisis jalur)	<p><i>Government Expenditure</i> (Pengeluaran Pemerintah):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Productive capital expenditures</i> (Belanja Modal Produktif) • <i>Less productive capital expenditures</i> (Belanja Modal Kuang Produktif) <p><i>RGDP</i> (PDRB)</p>	<p>Model I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pemerintah (Belanja modal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. • PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD • Pengeluaran pemerintah (Belanja modal) secara tidak langsung berpengaruh terhadap PAD melalui PDRB <p>Model II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal produktif (PCE) dan belanja modal kurang produktif (LPCE)

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Model	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
						<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LPCE berkontribusi lebih optimal terhadap PDRB dari pada PCE. • PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap empat PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah).
12	Gede Putra Sanjaya, I Nyoman Mahendra Yasa	2018	Analisis Faaktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli	Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Jumlah Penduduk • Jumlah Wisatawan 	<p><u>Simultan:</u> Seluruh variabel independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD</p> <p><u>Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD • Jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Model	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
						<ul style="list-style-type: none"> Jumlah wisatawan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD.
13	Wiji Lestari, Suharno, Djoko Kristianto	2017	Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Perusahaan, dan Investasi terhadap PAD (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)	Regresi Linear Berganda menggunakan SPSS21	<ul style="list-style-type: none"> PDRB Jumlah Penduduk Jumlah Perusahaan Investasi 	<p><u>Simultan:</u> Seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.</p> <p><u>Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Jumlah perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD
14	Makdalena F. Asmuruf, Vikie A. Rimate, George M.V. Kawung	2015	Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong	Linear berganda menggunakan SPSS	<ul style="list-style-type: none"> PDRB Jumlah penduduk 	<p><u>Simultan:</u> Seluruh variabel independen pada keadaan konstan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD.</p> <p><u>Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PDRB berpengaruh positif

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Model	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
						dan tidak signifikan terhadap PAD. <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
15	H. Abdul Rahman Mus, Hj. Masdar Mas'ud, Hj. Andi Nirwana Nur	2018	<i>Evaluating Financial Performance in Local Government: A Study in South Sulawesi Province (Indonesia)</i>	Regresi data panel model <i>Fixed Effect</i> menggunakan eviews 9	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal • Belanja Modal • Pertumbuhan Ekonomi 	<p><u>Simultan:</u> Seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD</p> <p><u>Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap PAD • Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PAD • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap PAD

1. Berdasarkan penelitian Purbayu Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri, didapatkan hasil analisis regresi linier berganda yakni apabila dilihat secara simultan Pengeluaran Pembangunan, Jumlah Penduduk dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Kediri. Secara parsial juga ketiganya (Pengeluaran Pembangunan, Jumlah Penduduk dan PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Kediri. (Santoso & Rahayu, 2005)
2. Berdasarkan penelitian Supriyono tentang Peran Dana Perimbangan, Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Selama Otonomi Daerah di Wilayah Solo Raya, menggunakan model ekonometrika regresi linier dengan data panel didapatkan hasil yang menjelaskan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, dan interaksi antara dummy otonomi daerah dengan PDRB berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD. Secara parsial, PDRB dan interaksi antara dummy otonomi daerah dengan PDRB berhubungan positif terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk, dummy otonomi daerah dengan jumlah penduduk mempunyai bentuk hubungan negatif dengan PAD. (Supriyono, 2009)
3. Berdasarkan penelitian Putu Lia Perdana Sari terkait analisis variabel-variabel yang mempengaruhi PAD, didapatkan hasil analisis regresi linier berganda yang menjelaskan bahwa secara simultan maupun parsial pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat pengeluaran pemerintah,

- PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Periode 1991-2009. (Sari, 2013)
4. Berdasarkan penelitian Gde Bhaskara Perwira Jaya dan A. A Bagus Putu Widanta tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Kota Denpasar, didapatkan hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa secara simultan variabel PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun secara parsial jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD, sementara PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD dan jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD. (Jaya & Widanta, 2014)
 5. Berdasarkan penelitian Pande Paramitha Wulandari dan Anak Agung Ketut Ayuningsasi terkait variabel yang mempengaruhi PAD, didapatkan hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan perkapita, tingkat inflasi, pengeluaran pemerintah, dan otonomi daerah berpengaruh terhadap PAD Provinsi Bali. Sementara secara parsial pendapatan perkapita dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali. Kemudian variabel otonomi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali. (Wulandari & Ayuningsasi, 2014)
 6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yeny Kuniawati Gitaningtyas dan Taufik Kurrohman pada tahun 2014 terkait pengaruh PDRB, jumlah

penduduk, dan investasi swasta terhadap realisasi PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, di dapatkan hasil yang menyatakan bahwa PDRB dan jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. (Gitaningtyas & Kurrohman, 2014)

7. Berdasarkan penelitian berjudul “*Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah*” yang dilakukan oleh Theodora Ririn, Rida Prihatni, dan Yunika Murdayanti (2014) dengan sampel seluruh provinsi di Indonesia didapati hasil bahwa secara parsial investasi dan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD dengan tingkat signifikansi 0,05. Sementara belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian ini dilakukan menggunakan program SPSS versi 19. (Ririn dkk, 2014)
8. Berdasarkan penelitian Hewi Susanti, Mohd. Nur Syechalad, dan Abubakar Hamzah terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap PAD pasca Tsunami. Penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan model regresi linear berganda yang kemudian didapatkan hasil bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Aceh, begitu pula dengan pengaruh kedua variabel independen tersebut secara simultan. Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh positif signifikan pada $\alpha=0,01$ terhadap PAD (Susanti dkk., 2017).

9. Berdasarkan penelitian Agus Indristno Kurniawan, Theresia Militina, dan Rachmad Budi Suharto yang berjudul “*Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah serta Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi*”, didapati hasil bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sementara investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut didapatkan setelah dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS for windows versi 24.(Kurniawan dkk, 2017)
10. Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Surya Anggara (2017) yang berjudul “*Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru*” dengan variabel dependen PDRB, jumlah penduduk dan inflasi didapatkan hasil secara parsial PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Kemudian inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Sementara secara simultan jika PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi bersifat konstan maka akan berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut didapat peneliti setelah melakukan analisis regresi berganda menggunakan program SPSS versi 17. (Anggara, 2017)
11. Penelitian berjudul “*The Effect of Capital Expenditure on Local Own-Source Revenue: Study in East Java Indonesia*” yang dilakukan oleh Danang Triyanto, Setyo Tri Wahyudi, dan Candra Fajri Ananda menunjukkan terdapat hubungan saling menopang antara pengeluaran pemerintah berupa belanja modal, PDRB, dan PAD. Penelitian ini menemukan beberapa hasil

yang dapat disimpulkan. *Pertama*, dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berupa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, yang selanjutnya PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Simpulan pertama, pengeluaran pemerintah berupa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, melalui PDRB. *Kedua*, penelitian ini menyatakan bahwa secara lebih spesifik belanja modal yang terbagi menjadi belanja modal produktif dan belanja modal. Belanja modal produktif (PCE) dan belanja modal kurang produktif (LPCE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Namun, belanja modal kurang produktif (LPCE) berkontribusi lebih optimal dengan nilai koefisien 0,726 satuan terhadap PDRB daripada belanja modal produktif (PCE) yang hanya memiliki koefisien sebesar 0,223 satuan. Selanjutnya PDRB berpengaruh secara parsial terhadap sumber PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. (Triyono *et al*, 2017)

12. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gede Putra Sanjaya dan I Nyoman Mahendra Yasa yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli*" memasukkan PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan sebagai variabel independen dalam model. Penelitian menggunakan metode regresi linear berganda dengan alat uji SPSS 21 ini menjelaskan bahwa secara simultan PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan dengan nilai

koefisien $2,68 \times 10^{-5}$ dan probabilitas sebesar 0,606. Selanjutnya secara parsial PDRB berhubungan positif dengan koefisien 1,468 dan signifikan dengan probabilitas 0,000. Sementara jumlah penduduk dan jumlah wisatawan secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD dengan masing-masing probabilitas sebesar 0,906 persen dan 0,705 persen (Sanjaya & Yasa, 2018).

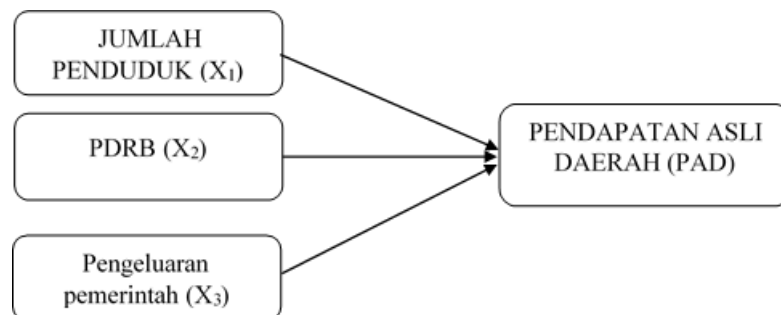
13. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiji Lestari, Suharno, dan Djoko Kristianto yang berjudul “*Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Jumlah Perusahaan, dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*”, didapatkan hasil bahwa secara simultan PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah perusahaan, dan investasi berhubungan positif dan signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan dengan nilai koefisien 22,993 satuan dan probabilitas sebesar 0,000. Selanjutnya secara parsial PDRB berhubungan negatif dengan koefisien (-0,037) dan signifikan dengan probabilitas 0,000. Jumlah penduduk berhubungan positif dengan koefisien 1,092 satuan dan signifikan dengan probabilitas 0,085. Sementara jumlah perusahaan dan investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD dengan masing-masing probabilitas sebesar 0,272 satuan dan 0,410 satuan (Lestari dkk, 2017).
14. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gede Putra Sanjaya dan I Nyoman Mahendra Yasa terhadap PDRB dan jumlah penduduk Kota Sorong sebagai variabel independen dalam model didapati hasil bahwa secara

simultan PDRB dan jumlah penduduk berhubungan negatif dan signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar (-5,107) dan probabilitas sebesar 0,000. Selanjutnya secara parsial PDRB berhubungan positif dengan t-statistik 1,051 dan tidak signifikan dengan probabilitas 0,316. Sementara jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif dengan t-statistik sebesar 4,594 dan signifikan dengan probabilitas sebesar 0,001 (Asmuruf dkk, 2015).

15. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Mus, Masdar Mas'ud, dan Andi Nirwana Nur yang berjudul "*Evaluating Financial Performance in Local Government: A Study in South Sulawesi Province (Indonesia)*", didapatkan hasil bahwa secara simultan desentralisasi fiskal, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dan signifikan terhadap PAD Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien konstanta pada *Fixed effect model* sebesar 8,51007 dan probabilitas sebesar 0,0310 (kurang dari $\alpha=0,05$). Selanjutnya secara parsial desentralisasi fiskal berhubungan positif dan signifikan dengan koefisien 1,180565 dan signifikan dengan probabilitas 0,0036. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,32250 dan signifikan dengan probabilitas 0,0246 dan pertumbuhan ekonomi yang juga berpengaruh positif signifikan terhadap PAD dengan koefisien sebesar 0,065013 dan probabilitas sebesar 0,0393. Penelitian pada jurnal *Research in Business and Management* ini dilakukan dengan menggunakan *eviews 9* (Mus dkk, 2018).

D. Kerangka Berpikir

Kerangka Konsep yang dapat dibentuk dari penelitian ini adalah:



GAMBAR 2. 2
Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat untuk penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2017.

E. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori yang telah dijabarkan diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat untuk penelitian ini adalah :

1. Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Diduga variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Diduga variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Riau.